



**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru Tahun 2018-2021)**

Rizkyyaturraudah¹, Saifhul Anuar Syahdan²

¹STIE Indonesia Banjarmasin

²STIE Indonesia Banjarmasin

Abstrak

Akibat adanya pandemi Covid-19 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola Pemerintah Daerah tahun sebelumnya harus dirubah dengan menyesuaikan keadaan pandemi Covid-19. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan pada Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru sebelum maupun ada pandemi Covid-19 di tahun 2018-2021. Jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Metode penelitian digunakannya metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Kinerja Keuangan Daerah jika dilihat dari rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu belum maupun adanya pandemi Covid-19 di tahun 2018-2021 memiliki pola hubungan instruktif. Sedangkan Kota Banjarbaru belum maupun terjadi pandemi Covid-19 tahun 2018-2021 memiliki pola hubungan Konsultatif. Kinerja Keuangan Daerah dilihat dari rata-rata Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kota Banjarbaru belum maupun ada pandemi Covid-19 di Tahun 2018-2021 Kota Banjarbaru lebih efektif berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas PAD dibandingkan Kabupaten Tanah Bumbu. Kinerja Keuangan Daerah jika dilihat dari rata-rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kota Banjarbaru sebelum pandemi Covid-19 tahun 2018-2019 Kabupaten Tanah Bumbu lebih efisien berdasarkan nilai rasionya dibandingkan Kota Banjarbaru. Sedangkan selama masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru sama memiliki kriteria kurang efisien.

Kata Kunci: Analisis, Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah, Pandemi Covid-19

Abstract

As a result of the Covid-19 pandemic, the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) managed by the Regional Government in the previous year had to be changed to adjust to the circumstances of the Covid-19 pandemic. The aim of the study was to analyze the comparison of financial performance in Tanah Bumbu Regency and Banjarbaru City before or during the Covid-19 pandemic in 2018-2021. If seen from the Regional Financial Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio. The research method uses a quantitative descriptive method. The results of this study indicate that Regional Financial Performance when viewed from the average Regional Financial Independence Ratio for Tanah Bumbu Regency has not yet had an instructive relationship pattern with the Covid-19 pandemic in 2018-2021. Meanwhile, the City of Banjarbaru has not yet experienced the Covid-19 pandemic in 2018-2021 and has a Consultative relationship pattern. Regional Financial Performance seen from the average PAD Effectiveness Ratio of Tanah Bumbu Regency and Banjarbaru City not yet or there is a Covid-19 pandemic in 2018-2021 Banjarbaru City is more effective based on the results of calculating the effectiveness ratio of PAD compared to Tanah Bumbu Regency. Regional Financial Performance when viewed from the average Regional Financial Efficiency Ratio of Tanah Bumbu Regency and Banjarbaru City before the Covid-19 pandemic in 2018-2019 Tanah Bumbu Regency was more efficient based on its ratio value compared to Banjarbaru City. Meanwhile, during the 2020-2021 Covid-19 pandemic, Tanah Bumbu Regency and Banjarbaru City had the same criteria for being less efficient.

Keywords: Analysis, Financial Performance, Local Government, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh luas pada masyarakat terhadap wilayah yang terdampak satu diantaranya di Indonesia. Pandemi Covid-19 berdampak besar pada penurunan pendapatan seluruh pemerintah daerah, termasuk Kalimantan Selatan, berbagai tahapan antisipasi dilakukan pemerintah dalam mengurangi penyebaran Covid-19, tahapan tersebut tentu memengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat.

Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020-2021, Menanggapi hal seperti itu, pemerintah memanasifestasikan peraturan *refocussing* dan realokasi anggaran berbagai bidang yang tertera pada Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 berisikan Percepatan Penanganan Corona, dan Intruksi Presiden No 4 Tahun 2020 berisikan *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa pada Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (Vebiani dkk., 2022).

Pandemi Covid-19 tentu berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah satu diantaranya pada pendapatan dan belanja yang adanya perubahan yang signifikan. Akibat adanya pandemi Covid-19 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola Pemerintah Daerah di tahun sebelumnya harus dirubah dengan menyesuaikan keadaan pandemi Covid-19. Karena kondisi tersebut, ada beberapa anggaran yang tidak bisa direalisasikan karena harus memprioritaskan untuk masalah pandemi Covid-19.

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018-2021, menyatakan bahwa anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi yang cenderung menurun terutama dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan ada indikasi perencanaan yang kurang diperhitungkan. Begitu juga untuk realisasi PAD tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi menurun, yang mengindikasikan adanya penyerapan anggaran yang belum optimal. Akibatnya akan memengaruhi kinerja dalam penyusunan keuangan tersebut.

Pada Laporan Realisasi Anggaran Kota Banjarbaru tahun 2018-2021, menyatakan bahwa anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan ada indikasi perencanaan yang baik. Begitu juga untuk realisasi PAD 2018-2021 mengalami peningkatan, yang mengindikasikan adanya penyerapan anggaran yang optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Onibala, dkk (2021) mendapatkan hasil yaitu kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam pandemi Covid-19 dibandingkan kinerja tahun sebelum pandemi Covid-19 tidak mengalami penurunan yang berarti. Penelitian yang dilakukan Soraida (2022) mendapatkan hasil bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan rasio efektivitas PAD tahun 2018 termasuk efektif, tahun 2019 sangat efektif, tahun 2020 kurang efektif, dan tahun 2021 realisasi efektivitas PAD sangat efektif. Rasio kemandirian tahun 2018 kurang mandiri, tahun 2019 cukup mandiri, tahun 2020 sedang, dan tahun 2021 cukup mandiri.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Onibala (2021) di Kabupaten Minahasa yang mana penelitian ini hanya mengambil data dua periode yaitu sebelum masa pandemi Covid-19 tahun 2019 dan selama masa pandemi Covid-19 tahun 2020. Peneliti ini menambah periode waktu pengamatan sebelum pandemi Covid-19 tahun 2018-2019 dan selama masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih spesifik. Selain itu, penelitian bertujuan mengkaji lebih dalam perbandingan kinerja keuangan antara Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru sebelum serta pada pandemi Covid-19 tahun 2018-2021.

Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah yang digunakan berupa rasio keuangan daerah terdiri atas Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Holung dkk. (2021) menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan suatu pencapaian berdasarkan hasil Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang mencakup anggaran dan realisasi PAD yang menggunakan indikator keuangan yang ditentukan berdasarkan kebijakan serta ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Saragih dan Siregar (2020) Rasio kemandirian keuangan daerah atau otonomi fiskal menyatakan potensi pemerintah daerah menganggarkan sendiri adanya aktivitas pemerintah, pembangunan berdasarkan target yang ditentukan pelayanan terhadap masyarakat yang sudah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Nilai kemandirian keuangan daerah dapat dikriteriakan sebagai berikut.

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Daerah	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Fitra (2019)

Rasio Efektivitas PAD

Menurut Halim dalam Fitriandi (2020) Rasio Efektifitas PAD ini memanifestasikan potensi pemerintah daerah sebagai merealisasikan penerimaan PAD yang disusun secara sistematis kemudian dibandingkan pada target penerimaan PAD yang ditentukan berdasarkan potensi riil daerah. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Secara umum, nilai efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut.

Tabel 2. Kriteria Rasio Efektivitas PAD

Kriteria	Rasio Efektivitas PAD
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: Mahmudi dalam Fitriandi (2020)

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Halim dalam Pundissing dan Pagiu (2020) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah merincikan perbandingan antar besar biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan berdasarkan realisasi penerimaan daerah yang didapat.

Menghitung perbandingan menggunakan rumus berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Nilai efisiensi dapat dikriteriakan sebagai berikut.

Tabel 3. Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Efisien	60% - 80%
Cukup Efisien	80% - 90%
Kurang Efisien	90% - 100%
Tidak Efisien	<100%

Sumber: Halim dalam Pundissing dan Pagiu (2020)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang – Undang No 17 Tahun 2003 berasaskan Keuangan Negara, Pasal 1 ayat 8 berisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama satu tahun, dimulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. APBD terdiri Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian yaitu penelitian deskriptif kuantitatif, agar mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru belum maupun ada pandemi Covid-19 pada tahun 2018-2021 melalui rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah.

Jenis data penelitian ialah data deskriptif kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018-2021. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru tahun 2018-2021 yang diperoleh dari Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Bumbu dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif mendeskripsikan variabel yang dinilai melalui rasio kinerja keuangan daerah meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018-2021 terdapat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018-2021

	Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
Sebelum Pandemi	2018	185.351.937.574,98	1.240.124.538.530,00	14,94	Instruktif
	2019	156.455.838.001,83	1.807.384.821.434,00	8,65	Instruktif
		Rata-Rata		11,79	Instruktif
Selama Masa Pandemi	2020	167.344.871.876,69	1.383.561.875.048,00	12,09	Instruktif
	2021	158.296.425.254,00	1.448.929.336.890,00	10,92	Instruktif
		Rata-Rata		11,50	Instruktif

Sumber: Data diolah BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu (2023)

Berdasarkan perhitungan Tabel 4 rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tanah Bumbu tergolong rendah serta pola hubungan instruktif yang mana peran pemerintah pusat lebih menonjol dibandingkan kemandirian pemerintah daerah. Penurunan terjadi di tahun 2019 yang mana nilainya 8,65% dan peningkatan terjadi di tahun 2018 yaitu 14,94%. Sedangkan tahun lainnya yaitu tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar: 12,09% dan 10,92%.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarbaru

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarbaru tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018-2021

	Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
Sebelum Pandemi	2018	229.786.672.728,92	830.541.982.263,00	27,66	Konsultatif
	2019	268.478.689.209,48	738.324.199.480,00	36,36	Konsultatif
		Rata-Rata		32,01	Konsultatif
Selama Masa Pandemi	2020	245.819.808.796,48	749.743.601.138,00	32,78	Konsultatif
	2021	319.569.874.019,85	751.649.124.973,00	42,51	Konsultatif
		Rata-Rata		37,64	Konsultatif

Sumber: Data diolah BPKAD Kota Banjarbaru (2023)

Berdasarkan perhitungan Tabel 5 rasio kemandirian keuangan daerah Kota Banjarbaru tergolong sangat rendah yang mana pola hubungan terdapat pola hubungan konsultatif yang mana peranan pemerintah pusat lebih menonjol dibandingkan kemandirian pemerintah daerah. Penurunan terjadi di tahun 2018 sebesar 27,66% dan peningkatan di tahun 2021 yaitu sebesar 42,51%. Dibandingkan tahun yang lain yaitu tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar : 36,36% dan 32,78%.

Perbandingan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 Tahun 2018-2021.

Hasil perbandingan ditunjukkan pada Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6 Perbandingan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2018-2021

	Tahun Anggaran	RKKD (%) Kab.Tanah Bumbu	Pola Hubungan	RKKD (%) Kota Banjarbaru	Pola Hubungan
Sebelum Pandemi	2018	14,94	Instruktif	27,66	Konsultatif
	2019	8,65	Instruktif	36,36	Konsultatif
	Rata-Rata	11,79	Instruktif	32,01	Konsultatif
Selama Pandemi	2020	12,09	Instruktif	32,78	Konsultatif
	2021	10,92	Instruktif	42,51	Konsultatif
	Rata-Rata	11,50	Instruktif	37,64	Konsultatif

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu belum dan sesudah pandemi Covid-19 tahun 2018-2021 tergolong sangat rendah yaitu dengan angka 0% - 25% sehingga memiliki pola hubungan yang Instruktif. Sedangkan Kota Banjarbaru belum dan sesudah pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong rendah yaitu dengan angka 25% - 50% sehingga memiliki pola hubungan yang Konsultatif. Jika dibandingkan rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kota Banjarbaru sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 Kota Banjarbaru dinyatakan sedikit lebih mandiri dibuktikan tingkat nilai rasionya lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tanah Bumbu.

B. Rasio Efektivitas PAD

1. Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Tanah Bumbu

Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018-2021 berdasarkan Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018-2021

	Tahun Anggaran	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
Sebelum Pandemi	2018	190.058.674.778,00	185.351.937.574,98	97,52	Cukup Efektif
	2019	153.230.709.891,00	156.455.838.001,83	102,10	Sangat Efektif
	Rata-Rata			99,81	Efektif
Selama Masa Pandemi	2020	145.745.791.574,00	167.344.871.876,69	114,81	Sangat Efektif
	2021	249.056.994.786,00	158.296.425.254,00	63,55	Tidak Efektif
	Rata-Rata			89,18	Kurang Efektif

Sumber: Data diolah BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu (2023)

Berdasarkan perhitungan Tabel 7 rasio efektivitas PAD Kabupaten Tanah Bumbu bahwa sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2018 termasuk kriteria Cukup Efektif sebesar 97,52%, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 102,10% dan dikatakan Sangat Efektif dan setelah ada pandemi Covid-19 pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan sebesar 114,81% dan dikatakan Sangat Efektif, lalu pada tahun 2021 selama masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan kembali menjadi menjadi 63,55% sehingga dapat dikatakan Tidak Efektif.

2. Rasio Efektivitas PAD Kota Banjarbaru

Rasio Efektivitas PAD Kota Banjarbaru tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kota Banjarbaru Tahun 2018-2021

	Tahun Anggaran	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
Sebelum Pandemi	2018	204.642.528.120,00	229.786.672.728,92	112,28	Sangat Efektif
	2019	229.494.354.045,00	268.478.689.209,48	116,98	Sangat Efektif
Rata-Rata				114,63	Sangat Efektif
Selama Masa Pandemi	2020	196.532.431.870,00	245.819.808.796,48	125,07	Sangat Efektif
	2021	260.906.556.055,00	319.569.874.019,85	122,48	Sangat Efektif
Rata-Rata				123,77	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah BPKAD Kota Banjarbaru (2023)

Berdasarkan perhitungan Tabel 8 rasio efektivitas PAD Kota Banjarbaru bahwa belum terjadi pandemi Covid-19 di tahun 2018 sebesar 112,28%, tahun 2019 sebesar 116,98%, dan sudah ada pandemi Covid-19 di tahun 2020 sebesar 125,07%, tahun 2021 sebesar 122,48%. Dari tahun 2018-2021 termasuk kriteria Efektif, sebab nilai yang diterima tentu lebih dari 100%.

Perbandingan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 Tahun 2018-2021.

Hasil perbandingan ditunjukkan di Tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 9. Perbandingan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2018-2021

	Tahun Anggaran	REPAD (%) Kab.Tanah Bumbu	Kriteria	REPAD (%) Kota Banjarbaru	Kriteria
Sebelum Pandemi	2018	97,52	Cukup Efektif	112,28	Sangat Efektif
	2019	102,10	Sangat Efektif	116,98	Sangat Efektif
Rata-Rata		99,81	Efektif	114,63	Sangat Efektif
Selama Pandemi	2020	114,81	Sangat Efektif	125,07	Sangat Efektif
	2021	63,55	Tidak Efektif	122,48	Sangat Efektif
Rata-Rata		89,49	Kurang Efektif	123,77	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan rata-rata Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Tanah Bumbu belum ada Covid-19 di tahun 2018-2019 sebesar 99,81% mempunyai kriteria Efektif. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebelum pandemi Covid-19 menjelaskan bahwa mempunyai kinerja yang baik pada hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan dan ketika pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021 sebesar 89,49 memiliki kriteria Kurang Efektif. Situasi tersebut terjadi ada turunnya aktivitas masyarakat yang mana akan berpengaruh terhadap PAD yang didapat dari pemerintah. Lalu, rata-rata Rasio Efektivitas PAD Kota Banjarbaru sebelum pandemi Covid-19 tahun 2018-2019 sebesar 114,63% memiliki kriteria Sangat Efektif. Begitupun juga Rasio Efektivitas PAD selama masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 sebesar 123,77% memiliki kriteria Sangat Efektif yaitu dengan rasio efektivitas PAD lebih dari 100%. Pemerintah Kota Banjarbaru

dikatakan mempunyai kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang sudah direncanakan. Jika dibandingkan rata-rata Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kota Banjarbaru sebelum maupun setelah ada pandemi Covid-19 di tahun 2018-2021 Kota Banjarbaru disebutkan lebih efektif dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas PAD dibandingkan Kabupaten Tanah Bumbu.

C. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

1. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Rasio Efisiensi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018-2021

	Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REKD (%)	Kriteria
Sebelum Pandemi	2018	1.259.928.416.337,92	1.585.860.733.359,98	79,44	Efisien
	2019	1.629.093.399.980,50	2.011.797.238.478,83	80,97	Cukup Efisien
Rata-Rata				80,20	Efisien
Selama Masa Pandemi	2020	1.698.564.592.776,05	1.606.289.371.025,69	105,74	Tidak Efisien
	2021	1.573.819.237.012,00	1.664.670.905.778,00	94,54	Kurang Efisien
Rata-Rata				100,14	Kurang Efisien

Sumber: Data diolah BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu (2023)

Dapat dilihat perhitungan Tabel 10 rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Tanah Bumbu bahwa belum ada pandemi Covid-19 pada tahun 2018 rasio efisiensinya sebesar 79,44% termasuk kriteria Efisien, tahun 2019 sebesar 80,97% termasuk kriteria Cukup Efisien dan terjadi pandemi Covid-19 di tahun 2020 sebesar 105,74% termasuk kriteria Tidak Efisien, dan pada tahun 2021 sebesar 94,54% termasuk kriteria Kurang Efisien.

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Banjarbaru

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Banjarbaru tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018-2021

	Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REKD (%)	Kriteria
Sebelum Pandemi	2018	1.034.531.706.892,80	1.087.333.979.004,92	95,14	Kurang Efisien
	2019	1.198.616.380.007,67	1.148.124.668.843,48	104,39	Tidak Efisien
Rata-Rata				99,76	Kurang Efisien
Selama Masa Pandemi	2020	1.143.444.581.014,29	1.191.849.733.453,48	95,93	Kurang Efisien
	2021	1.121.105.470.817,92	1.097.113.636.733,85	102,18	Tidak Efisien
Rata-Rata				99,05	Kurang Efisien

Sumber: Data diolah BPKAD Kota Banjarbaru (2023)

Berdasarkan perhitungan Tabel 11 rasio efisiensi keuangan daerah Kota Banjarbaru bahwa sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2018 rasio efisiensinya sebesar 95,14% termasuk kriteria Kurang Efisien, tahun 2019 sebesar 104,39% termasuk kriteria Tidak Efisien dan terjadi pandemi Covid-19 tahun 2020 sebesar 95,93% termasuk kriteria Kurang Efisien, pada tahun 2021 sebesar 102,18% termasuk kriteria Tidak Efisien.

Perbandingan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 Tahun 2018 – 2021.

Hasil perbandingan ditunjukkan pada Tabel 12 sebagai berikut.

Tabel 12. Perbandingan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2018-2021

	Tahun Anggaran	REKD (%) Kab.Tanah Bumbu	Kriteria	REKD (%) Kota Banjarbaru	Kriteria
Sebelum Pandemi	2018	79,44	Efisien	95,14	Kurang Efisien
	2019	80,97	Cukup Efisien	104,39	Tidak Efisien
	Rata-Rata	80,20	Efisien	99,76	Kurang Efisien
Selama Pandemi	2020	105,74	Tidak Efisien	95,93	Kurang Efisien
	2021	94,54	Kurang Efisien	102,18	Tidak Efisien
	Rata-Rata	100,14	Kurang Efisien	99,05	Kurang Efisien

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan rata-rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu belum terjadi Covid-19 tahun 2018-2019 sebesar 80,20% yaitu kriteria Efisien dan terjadi pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 sebesar 100,14% memiliki kriteria Kurang Efisien. Sedangkan rata-rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Banjarbaru sebelum maupun setelah ada pandemi Covid-19 tahun 2018-2021 sebesar 99,76% dan 99,05% memiliki kriteria Kurang Efisien. Jika dibandingkan rata-rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kota Banjarbaru belum terjadi pandemi Covid-19 tahun 2018-2019 Kabupaten Tanah Bumbu lebih efisien berdasarkan nilai rasionya dibandingkan Kota Banjarbaru. Situasi disebabkan karena pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018-2019 dapat meminimalisir jumlah Realisasi Belanja Daerahnya dengan baik. Berdasarkan rata-rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kota Banjarbaru selama masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 mengalami kriteria Kurang Efisien. Hal ini disebabkan karena Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru tahun 2018-2021 tergolong besar jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap data penelitian yang diperoleh berkaitan dengan laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru, memiliki simpulan yaitu:

1. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru sebelum maupun selama pandemi Covid-19 tahun 2018-2021. Jika dilihat dari rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 tahun 2018-2021 tergolong sangat rendah sehingga memiliki pola hubungan Instruktif. Sedangkan Kota Banjarbaru ditentukan rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kota Banjarbaru sebelum maupun setelah adanya pandemi Covid-19 tahun 2018-2021 tergolong rendah sehingga memiliki pola hubungan Konsultatif. Jika dibandingkan rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kota Banjarbaru sebelum maupun setelah adanya pandemi Covid-19 tahun 2018-2021 Kota Banjarbaru dinyatakan sedikit lebih mandiri dibuktikan tingkat nilai rasionya lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru sebelum maupun setelah adanya pandemi Covid-19 tahun 2018-2021. Berdasarkan rata-rata Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Tanah Bumbu ketika sebelum terjadi pandemi memiliki kriteria efektif bandingkan sebaliknya. Sedangkan rata-rata Rasio Efektivitas PAD Kota Banjarbaru sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 tahun 2018-2021 memiliki kriteria Sangat Efektif. Jika dibandingkan rata-rata Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kota Banjarbaru sebelum maupun setelah ada pandemi Covid-19 Tahun 2018-2021 Kota Banjarbaru lebih efektif berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas PAD dibandingkan Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru sebelum maupun setelah ada pandemi Covid-19 tahun 2018-2021. Jika dilihat dari rata-rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebelum pandemi Covid-19 tahun 2018-2019 memiliki kriteria Efisien dan selama masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 memiliki kriteria Kurang Efisien. Sedangkan rata-rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Banjarbaru sebelum pandemi Covid-19 dan selama masa pandemi Covid-19 tahun 2018-2021 memiliki kriteria Kurang Efisien. Jika dibandingkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kota Banjarbaru sebelum Covid-19 tahun 2018-2019 Kabupaten Tanah Bumbu lebih efisien berdasarkan nilai rasionya dibandingkan Kota Banjarbaru. Berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kota Banjarbaru selama pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 mengalami kriteria Kurang Efisien.

Keterbatasan penelitian ini dilakukan hanya 1 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru. Pengukuran kinerja keuangan berupa rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi keuangan daerah. Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, maka diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitian di lingkup yang lebih luas dari penelitian ini dan menambah rasio pengukuran kinerja keuangan.

Implikasi Penelitian ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru diharapkan agar dapat meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, serta melakukan pengendalian agar tidak terus menerus bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus bisa lebih efektif dan efisien lagi dalam memanfaatkan kekayaan daerah agar dapat meningkatkan potensi pendapatan asli daerah sehingga daerah tersebut akan mandiri dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnika, M., Putra, S., Sutrisno, dan Sudrajat. (2021). Analisis Kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 493-503. (<https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/view/3040>)
- Anshori, M., dan Iswati, S. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Airlangga University Press.
- Aryani, H., Fitri. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 147-156.
- Fadhilah, A., dan Haryatiningsih, R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung pada Masa Sebelum Pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2, 438-445. (<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bceses.v2i2.4434>)
- Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Penerbit CV IRDH.
- Fitriandi, P. d. (2020). *Bunga Rampai Keuangan Negara*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Hadiutomo, K. (2021). *Perencanaan Pembangunan Terintegrasi dan Terdesentralisasi Perspektif Reposisi Perencanaan Pembangunan Pertanian*. DEEPUBLISH CV Budi Utama.
- Harahap, J., Putri, Rajana, dan Nasution, M., Dahlena. (2019). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan pada Kinerja Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8, 9-14. (<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jab.v8i1.22406>)
- Holung, R., Lalenoh, Kawung, G., M. V, dan Steeva, T. (2021). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9, 869-877. (<https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32595>)
- Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) In. *Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tanah Bumbu*. (2018-2021).
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta BPFE.
- Nasution, D., Aditia, Darma, Erlina, dan Muda, I. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 212-224.
- Onibala, A., Rotinsulu, T., Oldy, dan Rorong, I., Pingkan F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22, 67-89. (<https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpek.d.35097.22.2.2021>)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. (2020). In.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional In.
- Pundissing, R., dan Pagiu, C. (2020). Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara. *Paulus Journal Of Accounting*, 2. (<https://doi.org/https://doi.org/10.34207/pja.v2i2.267>)

- Qisthina, F., Amalina, Wahyudi, S., Tri, dan Khusaini, M. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus *Jurnal EKOBIS: Ekonomi, Bisnis & Manajemen*, 10, 107-118. (<https://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/ekobis>)
- Santika, I., Putu, dan Adnyana, I., ;Bagus, Made, Punia. (2022). Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Journal Of Applied Management Studies (Jamms)*, 3, 173-190. (<https://doi.org/https://doi.org/10.51713/jamms.v3i2.54>)
- Saragih, F., dan Siregar, I., Azilla. (2020). Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Seminar of Social Sciences Engineering dan Humaniora*(2020), 43-53. (<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/scenario/article/view/1153>)
- Soraida, S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Sebelum dan Selama Masa Pandemi *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1, 78-82. (<https://doi.org/https://doi.org/10.56127/jekma.v1i2.154>)
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., dan Sofiati, N. (2021). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1, 81-92. (<https://doi.org/https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>)
- Vebiani, D., Nugraha, dan Hardiana, R., Dian. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat). *Journal Of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 1, 113-126.